

ANALISIS ASAS FIKTIF POSITIF DAN ASAS *AL-ĀDL* DALAM *FIQH*

SIYĀSAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023

TENTANG CIPTA KERJA

SKRIPSI

Oleh

Dwi Nugroho Setiawan

NIM. 05020420031



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Nugroho Setiawan
NIM : 05020420031
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Asas Fiktif positif dan Asas AL-ADL
Dalam fikih siyasah Terhadap Undang-Undang No
Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Maret 2024
Saya yang menyatakan,



Dwi Nugroho Setiawan
NIM. 05020420031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 20 Maret 2024
Pembimbing,

Dr. Suyikno, S.AG, M.H.
NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

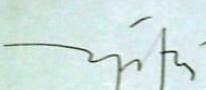
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dwi Nugroho Setiawan
NIM. : 05020420031

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Dr. Suvikno, S.Ag., M.H.
NIP. 197307052011011001

Penguji III


Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji II


Dr. Achmad Yasin, M.A.
NIP. 196707271996031002

Penguji IV


Mega Avu Ningtyas, M.H.
NIP. 19931204202122017

Surabaya, 12 juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Amzah Muafah, M.A.

NIP. 19630327199032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Nugroho Setiawan
NIM : 05020420031
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : Dinan.setiawan11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS ASAS FIKTIF POSITIF DAN ASAS *AL-ĀDL* DALAM *FIQH SIYĀSAH*

TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Agustus 2024

Penulis

(Dwi Nugroho Setiawan)

ABSTRAK

Skripsi ini Merupakan hasil dari penelitian pustaka yang berjudul “Analisis Asas Fiktif Positif dan Asas *Al-ādl* dalam *Fiqh Siyāsah* Terhadap Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja” Penelitian ini ditulis bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu: bagaimana asas Fiktif Positif setelah diundangkannya Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, dan bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat yang tidak mendapatkan tanggapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode normatif yang mana menggunakan studi pustaka dalam mengumpulkan data. Teknis analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang mana dapat memberikan gambaran secara metodis, faktual, dan akurat yang berkenaan dengan objek dari penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *Statue Approach* dan pendekatan konseptual *conceptual approach*.

Hasil dari penelitian ini ialah dengan hilangnya kewenangan pengadilan tata usaha negara membuat asas-asas keadilan yang ada tidak berjalan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam asas *Al-ādl*. Masyarakat juga dirugikan tetapi dengan adanya gugatan *omission* keadilan bagi masyarakat kembali terpenuhi karena gugatan *omission* dapat menggantikan fungsi dari asas fiktif positif yang mana hal tersebut dapat mengembalikan keadilan yang hilang yang diakibatkan oleh hilangnya wewenang dari pengadilan tata usaha negara terhadap permohonan fiktif positif tersebut.

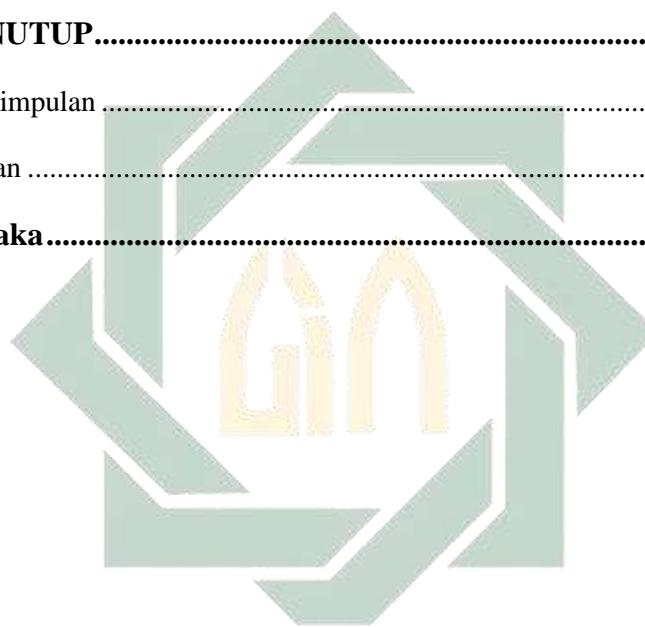
Saran yang diberikan peneliti ialah agar pemerintah untuk meneliti dengan detail undang-undang sebelum disahkan dan menguji dulu undang-undang tersebut. Semoga pemerintah meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat agar dikemudian hari tidak ada masyarakat yang dirugikan lagi.

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
Kata Pengantar	ii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah :	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Definisi Operasional	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP AL-ĀDL DALAM <i>FIQH SIYĀSAH</i>	22
A. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	22
B. Pemerintahan Menurut Pandangan <i>Fiqh Siyāsah</i>	25
C. Prinsip <i>Fiqh Siyāsah</i> tetang pemerintahan.....	27
D. Konsep Al-ādl dalam <i>Fiqh Siyāsah</i>	38
E. Pengertian Asas <i>Fiqh Siyāsah</i>	44
BAB III ASAS FIKTIF POSTIF SETELAH DI UNDANGKAN-NYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA	49
A. Kedudukan Asas Fiktif Postif Setelah Di Undang-Kanya Undang-Undang Cipta Kerja	49
B. Berlakunya Fiktif Positif Setelah Keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja.....	61
C. Berlakunya hukum fiktif positif jika di lihat dalam Undang-Undang Administrasi pemerintah	63

D. Berlakunya hukum fiktif positif jika di lihat dalam Undang-Undang Cipta Kerja	65
BAB IV ANALISIS FIQH SIYĀSAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MENDAPAT TANGGAPAN DARI PEJABAT TUN.....	71
A. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mendapat Tanggapan Dari PTUN.....	71
B. Analisis Fikih Siyasah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak mendapat Tanggapan Dari Pejabat TUN.....	80
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
Daftar pustaka.....	91



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Daftar pustaka

Jurnal

- Abrianto, Bagus Oktafian, Xavier Nugraha, Julienna Hartono, and Indah Permatasari Kosuma. "Problematika Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020." *Arena Hukum* 16, no. 3 (December 31, 2023): 532–556.
- Ahmad. Konsep Fiktif Positif: Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (September 1, 2017): 141.
- Andika Risqi Irvansyah. Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja." *JAPHTN-HAN* 1, no. 2 (June 29, 2022). Accessed February 25, 2024. <http://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/31>.
- Arniti, Ni Komang Ayu. "Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara." . *CC* 1 (n.d.).
- Astomo, Putera. Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia 1, no. 1 (2014).
- Fadli, Muhammad Rijal. Memahami desain metode penelitian kualitatif 21, no. 1 (2021).
- Harun, Nurlaila. Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam 1, no. 2 (2021).
- Heriyanto, Bambang. Problematika Penyelesaian Perkara Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Palar (Pakuan Law review)* 5, no. 1 (January 1, 2019). Accessed December 22, 2023. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/1185>.
- _____. Problematika Penyelesaian Perkara 'Fiktif Positif' Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Palar / Pakuan Law Review* 5, no. 1 (January 1, 2019). Accessed February 25, 2024. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/1185>.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Cv. Amanah, 2019.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*, 2014.
- Irvansyah, Andika Risqi. "Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja." *JAPHTN-HAN* 1, no. 2 (July 31, 2022): 208–226.
- Jafar, Wahyu Abdul. Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist. *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (July 1, 2018): 18.

Kristian, Denny. Upaya Permohonan Putusan Fiktif Positif Terhadap Asas Kepastian Hukum Dalam Lingkup Administrasi Pemerintahan, no. 1 (n.d.).

Kurdi, Dkk, Sulaiman. Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) Di Dalam Surah An-Nisa : 59, Al-Anfal :46 Dan Al-Maidah : 48-49 (Analisis Tafsir Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, Dan Ibnu Katsir). *Journal of Islamic Law and Studies* 1, Nomor 1 (2017).

Marlina, Rika. "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (March 10, 2018). Accessed October 25, 2023. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2631>.

Muhtar, Zainuddin. "Ibnu Abbas: (Studi Biografi Generasi Awal Mufassir Al-Qur'an)." *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman* 1, no. 1 (June 14, 2019): 96–107.

Rahmawati, Rahmawati. Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Usul Fiqih). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (September 9, 2016). Accessed December 21, 2023. <http://jurnal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/260>.

Roychan, Wahidur. Konsep Dan Penyelesaian Asas Fiktif Positif Menurut Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (June 30, 2023): 69–90.

Setyono, Joko. "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (June 1, 2015): 25.

Simanjuntak, Enrico. Perkara Fiktif Positif Dan Permasalahan Hukumnya. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6 (2017).

Tampubolon, Nancy Soise Lestari, Kartika Widya Utama, and Aju Putrijanti. Penerapan Pemeriksaan Fiktif Positif Dalam Upaya Memperoleh Kepastian Hukum Di Peradilan Tata Usaha 10 (2021).

Utami, Nurdyiana, Sulastri,Ichwani. *Hukum Tata Negara*. Amelia Haryati. Unpam Press, n.d.

Wicaksono, Dian Agung, Bimo Fajar Hantoro, and Dedy Kurniawan. Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (August 27, 2021): 323.

Wulandari, Desy. "Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (January 1, 2020). Accessed

October 25, 2023. <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16801/pdf>.

Website

<http://repository.radenintan.ac.id/14208/2/COVER%2C%20BAB%201%2C%20BAB%205%20DAPES%20%20ERPI%20SETIAWAN.pdf>.

Harun, Nurlaila. Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam 1, no. 2 (2021).

Utami, Nurdyiana, Sulastri, Ichwani. *Hukum Tata Negara*. Amelia Haryati. Unpam Press, n.d.

Fiktif Positif versus Standar Pelayanan Publik - Ombudsman RI.” Accessed December 22, 2023. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--fiktif-positif-versus-standar-pelayanan-publik>.

Skripsi

Junior, Nizam Ahmad. Tinjauan Fiqh Siyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2013 Terhadap Keberadaan Gelandangan Dan Pengemis Di Pasar Kota Gresik Skripsi” (N.D.).

Setiawan, Epri. Analisis Fikih Siyasah Terhadap Pemikiran Al-Mawardi Tentang Pemilihan Pemimpin Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/14208/2/COVER%2C%20BAB%201%2C%20BAB%205%20DAPES%20%20ERPI%20SETIAWAN.pdf>.

Yuliani, Erlin Triartha. “Perbandingan antara Konsep Fiktif Negatif dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Fiktif Positif dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan Permasalahannya.” *University Of Bengkulu Law Journal* 5, no. 1 (April 29, 2020): 1–11.

Yuniza, Mailinda Eka, and Melodia Puji Inggarwati. “Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif Setelah Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal de jure* 13, no. 2 (October 23, 2021). Accessed

December 22, 2023. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/539>.

———. “Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Cipta Kerja Diundangkan” (n.d.).

Buku

Arake, Lukman. *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan*. D.I. Yogyakarta: Lintas Nalar, CV, 2020. <http://repositori.iain-bone.ac.id/89/1/BUKU-%20HADIS.pdf>.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*, 2014.

Djazuli, Prof H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019.

Rafi, Fulki Ainur. *Ringkasan Pelajaran Ushul Fiqh: Membahas Seputar Masalah Fikih, Sejarah hingga Siyasah*. Blurb Incorporated, 2021.

“Al-Quran,” 2019.



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**